

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK
TETAP DEWAN KEAMANAN PBB PERIODE 2019-2020**

Oleh : Laila Yunita

(lailayunita99@gmail.com)

Pembimbing : Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliografi : 14 buku, 20 Jurnal, 35 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research will explain Indonesia's foreign policy during its time as a non-permanent member of the UN Security Council for the period 2019-2020. The struggle to become a non-permanent member of the UN Security Council is not a short process for Indonesia. The desire to become a non-permanent member of the UN Security Council has existed since 2009, but Indonesia officially announced its nomination in 2016. Until finally on June 8, 2018, Indonesia was successfully elected as a non-permanent member of the UN Security Council for the 2019-2020 period. This is the fourth time Indonesia has been entrusted with the task of being a non-permanent member of the UN Security Council, after being elected last in the 2007-2008 period. Therefore, this research will explain what foreign policies were made by Indonesia when it was elected as a non-permanent member of the UNSC for the 2019-2020 period, and what factors influenced Indonesia to take these policies.

The research method used in this research is qualitative data analysis method with descriptive type. The data collection technique uses primary data collection methods and secondary data. Meanwhile, the level of analysis used in this research is the state level analysis.

Based on the research results obtained, it can be seen that Indonesia's foreign policy when elected as a non-permanent member of the UNSC for the 2019-2020 period consists of 4 priorities and 1 main concern. These policies are creating a world peace ecosystem through a dialogue approach and active participation in UN peacekeeping missions, increasing synergy between the UN Security Council and regional organizations in overcoming conflicts in the region, increasing efforts to combat terrorism and extremism, ensuring synergy between peace building and sustainable development, as well as the Palestinian issue which is Indonesia's main concern in the UN Security Council. Meanwhile, there are also factors that influence Indonesia in making these policies, starting from setting internal and external motivation, information flow, the influence of various international politics, and the situation when decisions are made.

Keywords : Indonesia, The UN Security Council, Foreign Policy.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menunjukkan keaktifannya dalam dunia internasional melalui kebijakan politik luar negeri Indonesia yang mengusung prinsip bebas dan aktif. Keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat kita lihat dari keanggotaannya dalam organisasi internasional, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 yaitu pada 28 September 1950.¹

Selama menjadi anggota PBB, sudah banyak pencapaian membanggakan yang ditorehkan Indonesia dikancah internasional. Pencapaian pertama Indonesia dalam DK PBB adalah pada saat terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974-1975. Pada tahun 1995-1996, Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk yang kedua kalinya. Kemudian di tahun 2007-2008, Indonesia juga terpilih menjadi anggota tidak tetap DK-PBB untuk yang ketiga kalinya.

Di tahun 2019, Indonesia terpilih untuk yang keempat kalinya menjadi anggota tidak tetap DK-PBB. Indonesia kemudian menduduki posisi tersebut mulai dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.²

¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)". Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/hal_aman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

² *Voice of America*. (2019, Januari 3). "Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan pbb". Terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/indonesi-a-resmi-anggota-dewan-keamanan->

Keberhasilan Indonesia untuk mencapai posisi tersebut merupakan hasil kerja keras dari para diplomat dan delegasi Indonesia yang berhasil melakukan beberapa pendekatan diplomasi terhadap negara lain. Hal ini dibuktikan dengan besarnya perolehan suara yang dimenangkan Indonesia dimana Indonesia berhasil memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.³ Indonesia unggul dengan 98 suara lebih banyak dari Maladewa yang merupakan satu-satunya singan Indonesia merebut 1 kursi Grup Asia dan Pasifik.

Selain Indonesia, ada empat negara lainnya yang berhasil terpilih menduduki posisi tersebut yaitu Jerman, Belgia, Afrika Selatan, dan Republik Dominika. Adapun lima anggota tidak tetap lainnya adalah Polandia, Guinea Ekuatorial, Pantai Gading, Peru dan Kuwait.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tulisan ini akan menganalisis tentang kebijakan luar negeri Indonesia ketika terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 dan faktor-faktor

[pbb/4726303.html](https://www.pbb/4726303.html) diakses pada 23 Februari 2020 pukul 20:28 WIB.

³ Farras, Bernhart. (2019, Januari 3). "Sah, Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan Keamanan PBB". Terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190103152603-4-48954/sah-indonesia-kembali-jadi-anggota-dewan-keamanan-pbb> diakses pada 23 Februari 2020 pukul 20:47 WIB.

⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 14.

yang mempengaruhi Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan tersebut. Tulisan ini kemudian menarik untuk dikaji secara mendalam karena terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK-PBB periode 2019-2020 kemarin, merupakan bukti dari dukungan dunia internasional yang mengakui keaktifan dari diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

KERANGKA TEORI

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan metode analisis data kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Sementara itu, tingkat analisa yang digunakan adalah tingkat analisa negara. Pada tingkat analisa ini fokus utamanya adalah negara yang berupa penjelasan tentang perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut.

Untuk perspektif, penulis menggunakan perspektif realisme dalam penelitian ini. Adapun pemikiran-pemikiran dari realisme ini adalah :

1. Negara adalah aktor utama.
2. Negara dianggap sebagai *unitary actor* (aktor tunggal).
3. Negara sebagai aktor yang rasional.
4. Keamanan nasional adalah isu utama. Dalam hal ini aspek militer dan isu-isu yang berhubungan dengan

kemanan nasional mendominasi politik dunia.⁵

Untuk teori, penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri. Teori kebijakan luar negeri menurut Richard Snyder, H.W. Bruck dan Burton Sapin bahwa kebijakan luar negeri lebih menekankan kepada unsur pengambilan keputusan ataupun *decision making* sebagai fokus utamanya.⁶

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan yaitu faktor subyektif dan sumber-sumber potensial. Faktor subyektif adalah persepsi aktor dalam mendefinisikan situasi. Persepsi ini berpengaruh cukup besar sebab dalam situasi apapun, bagaimana aktor menginterpretasikan kondisi tersebut akan sangat menentukan hasil dari pengambilan keputusan. Sementara itu, sumber-sumber potensial menurut Snyder berasal dari dalam negeri (*setting internal*) dan luar negeri (*setting eksternal*). *Setting internal* adalah politik domestik termasuk opini publik, sedangkan *setting eksternal* adalah faktor-faktor non pemerintah dan interaksi antar negara seperti budaya, masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Intinya adalah tindakan negara merupakan hasil kombinasi

⁵ Asrudin, Azwar. "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional : Realisme sebagai Paradigma". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. IJIS Vol.1 No.2 Desember 2014. Hal 112-113.

⁶ Hudson, Valerie M. "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations". *International Studies Association*. 2005. Hal 3.

antara aktor, tujuan, cara, dan situasi.⁷

Teori pengambilan keputusan ala Snyder dan rekan-rekannya ini lebih menitikberatkan tentang penjelasan kebijakan luar negeri yang berada pada pendekatan level unit karena kebijakan luar negeri berasal dari unit negara yang bersifat *inward looking*. Selain unit negara, teori ini juga beranggapan bahwa pendekatan sistem internasional secara keseluruhan dapat berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor yang penting dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri menurut Snyder, Bruck dan Sapin yaitu:

- a. Motivasi dari pembuat keputusan
- b. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi),
- c. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri,
- d. Keadaan atau situasi saat keputusan tersebut diambil.⁸

PEMBAHASAN

Organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal dengan

United Nations pertama kali didirikan pada 24 Oktober 1945. Pada saat itu, ada 51 negara yang sepakat untuk mendirikan organisasi yang akan menjaga perdamaian dan membantu membangun dunia yang lebih baik melalui diselenggarakannya Konferensi San Fransisco.⁹ Namun, saat ini terdapat 193 negara anggota.

PBB sendiri terdiri dari enam badan utama yaitu *The General Assembly* (Majelis Umum), *The Security Council* (Dewan Keamanan), *The Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial), *The Trusteeship Council* (Dewan Perwalian), *The International Court of Justice* (Mahkamah Internasional) dan *UN Secretariat* (Sekretariat PBB).¹⁰

Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB ke-60 yaitu pada 28 September 1950.¹¹ Lambertus Nicodemus Palar terpilih sebagai Wakil Tetap RI pertama di PBB. Duta Besar Palar telah memiliki peranan yang cukup besar dalam usaha mendapatkan

⁷ Snyder, Richard N, Bruck and Burton Sapin, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the study of International Politics* Rosyidin, Mohammad. "Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme Neoklasik". GLOBAL. Vol.10 No.2 Desember 2010- Mei 2011. Hal 152.

⁸ Snyder, Richard N, Bruck and Burton Sapin, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the study of International Politics* dalam Yani, Mochamad Yanyan, Anak Agung Banyu Perwita. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 64.

⁹ United Nations. "History of The United Nations". Terdapat dalam <https://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html> diakses pada 16 Februari 2021 pukul 14:23 WIB.

¹⁰ United Nations. "Main Bodies". Terdapat dalam <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html> diakses pada 4 November 2020 pukul 20:49 WIB.

¹¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)". Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

pengakuan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia kemudian aktif terlibat dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional dan juga terhadap penyelesaian dalam negeri Indonesia sendiri yang bersengketa dengan Belanda terkait Irian Jaya. Pada 21 September 1962 diadakan Sidang Majelis Umum PBB ke-17 yang ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi “*The New York Agreement*”, dimana PBB kemudian membentuk badan yang berfungsi untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia. Badan tersebut kemudian diberi nama *United Nations Executive Authority* (UNTEA) yang bekerja secara efektif mulai dari 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.¹² Namun, sengketa Irian Barat tersebut tidak juga selesai.

Pada 20 Januari 1965, Indonesia sempat menyatakan pengunduran diri dan keluar dari keanggotaan PBB. Pengunduran diri Indonesia ini diumumkan langsung oleh Presiden Soekarno. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah Indonesia yang kecewa terhadap keputusan PBB yang mengakui kedaulatan Malaysia dan terpilihnya

Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.¹³

Pada masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengubah pandangannya terhadap PBB dan berniat kembali untuk menjadi anggota PBB. Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB.¹⁴ Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil menyelesaikan masalah Irian Jaya dimana pada 19 November 1969 yang mengukuhkan perpindahan kekuasaan di wilayah Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia.¹⁵

URGENSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DK PBB

Dewan Keamanan merupakan salah satu badan utama PBB yang dinilai paling berkuasa. Mulai dari

¹³ Kompas. (2020, Februari 10). “Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?”. Terdapat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/120000069/mengapa-indonesia-keluar-dari-pbb-pada-1965?page=all> diakses pada 23 Februari 2021 pukul 21:52 WIB.

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”. Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

¹⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”. Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

¹² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”. Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

menjadi sekjen PBB, menjadi hakim di Mahkamah Internasional sampai untuk menjadi negara anggota PBB harus mendapatkan persetujuan dari DK-PBB. Namun, kedudukan dari DK-PBB ini masih berada satu tingkat dibawah Majelis Umum. Adapun tujuan dibentuknya Dewan Keamanan ini adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini diatur dalam Piagam PBB Bab VII Pasal 39.¹⁶

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota yang terbagi atas 5 anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina dan 10 anggota tidak tetap.¹⁷ untuk anggota tidak tetap terdiri dari 10 negara, yang hanya diberi masa jabatan selama dua tahun. Seluruh negara anggota PBB berhak mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari anggota tidak tetap DK-PBB. Namun, untuk menjadi anggota tidak tetap DK-PBB, ada dua syarat utama jika ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu:

1. Sebuah negara harus memenuhi syarat yaitu berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Negara yang akan mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DK

¹⁶ Krustiyati, Atik. "Konsekuensi Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Majelis*. Edisi 02, Februari 2019. Hal 38.

¹⁷ Omba, Marthinus. "Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional". *Indonesian Journal of International Law*. Volume 5 No 4 Juli 2008. Hal 770.

PBB juga harus memperoleh suara mayoritas dua pertiga dari jumlah seluruh negara anggota Majelis Umum.¹⁸

Indonesia pertama kali berhasil menjadi bagian dari DK sebagai anggota tidak tetap pada periode 1974-1975. Ditambah lagi Indonesia berhasil menjadi Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974 yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.¹⁹ Pada tahun 1995-1996, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk yang kedua kalinya. Pada saat itu, Indonesia berhasil menjadi Presiden DK-PBB selama dua kali melalui Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti.²⁰ Pada saat itu, Indonesia berhasil menyumbangkan *Wisnumurti Guidelines* (Pedoman Wisnumurti) yang digunakan sebagai panduan untuk proses pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang telah digunakan sejak tahun 1996.

Pada tahun 2007-2008, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk yang ketiga kalinya, melalui wakil tetap RI Marty Natalegawa. Pada periode ini

¹⁸ Ibid. Omba, Marthinus. Hal 770-771.

¹⁹ Putra, Okto Dellon Sunuraz. (2019). "Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Orde Baru". Terdapat dalam <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Orde%20Baru-BB/Topik-4.html> diakses pada 3 Maret 2021 pukul 23:09 WIB.

²⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)". Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:56 WIB.

Indonesia dihadapkan dengan isu panas terkait program nuklir Iran yang kemudian dibahas pada forum DK PBB di tahun 2007. Dalam kesempatan tersebut, sikap politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden SBY pada saat itu lebih mendukung program pengembangan nuklir Iran tersebut, namun dengan catatan bahwa nuklir Iran tersebut hanya digunakan untuk tujuan damai.

Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki keinginan sejak 2009 untuk mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Namun, pada tahun 2016 melakukan kampanyenya secara resmi yang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di hadapan Sidang Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat.²¹ Adapun tema kampanye yang diusung adalah “*True Partner for Peace*”, mitra sejati bagi perdamaian dunia. Penyebaran kampanye dilakukan melalui media massa, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, seperti Twitter dan Instagram.

Pada 8 Juni 2018, Indonesia kemudian resmi terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dalam hal ini, Indonesia unggul 98 suara lebih banyak dari Maladewa yang merupakan satu-

satunya saingan Indonesia untuk merebut satu kursi Grup Asia dan Pasifik. Indonesia resmi menduduki posisi tersebut mulai dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

Adapun urgensi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia akan turut berpartisipasi dan ikut memutuskan permasalahan-permasalahan internasional, khususnya yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional.
- b. Indonesia ikut memajukan serta mempromosikan demokrasi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam forum internasional.
- c. Indonesia memiliki kesempatan untuk menetapkan agenda keamanan, mengingat posisinya sebagai negara dengan kekuatan menengah (*middle power*).
- d. Indonesia dapat meningkatkan peran kepemimpinan internasionalnya terkait dalam pengambilan keputusan mengenai perdamaian dan keamanan internasional.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DK PBB PERIODE 2019-2020

Sepanjang keanggotaannya di DK PBB, Indonesia telah membuktikan janji kampanyenya sebagai “*True Partner for Peace*”, mitra sejati dalam perdamaian. Indonesia tidak hanya menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang tetapi juga senantiasa berupaya mendorong kesatuan suara

²¹ Kompas. (2016, September 1). “Indonesia Siap Kampanye Pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB”. Terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/23125801/indonesia.siap.kampanye.pencalonan.anggota.tidak.tetap.dewan.keamanan.pbb> diakses pada 8 Maret 2021 pukul 16:33 WIB.

di DK PBB. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia memiliki 4 prioritas dan 1 perhatian utama di DK PBB, yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan ekosistem perdamaian dunia melalui pendekatan dialog dan partisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB.

Dalam kebijakan ini, Indonesia akan memperkuat tata kelola pemerintahan global dengan memperbaiki sistem yang berlaku di PBB dan memajukan perdamaian internasional. Indonesia juga aktif mempromosikan penyelesaian sengketa yang damai melalui kemitraan dan regionalisme, meningkatkan *Peacekeeping* dan *Peacebuilding* melalui peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian, memajukan kemitraan “*partnership*” dalam *sustaining peace*, meningkatkan peranan perempuan dalam perdamaian.²²

Dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia telah memulai kontribusinya sejak tahun 1957 dengan mengirimkan 559 personel. Namun jumlah personel Indonesia saat ini ada sekitar 3.554 personel, termasuk 94 personel perempuan. Hal ini kemudian

membuat Indonesia berada di urutan ke-7 negara dengan dengan penyumbang personel terbesar. Visi Indonesia selanjutnya adalah akan menempatkan 4000 personelnnya di berbagai MPP PBB. Indonesia juga berhasil meningkatkan peran *peacekeeper* perempuan melalui dikeluarkannya 1 Resolusi 2538 mengenai *Women in Peacekeeping*.

2. Meningkatkan Sinergi antara DK PBB dengan Organisasi Kawasan dalam Mengatasi Konflik di Kawasan

Sejumlah isu kawasan yang bersifat *country specific* juga mendapat perhatian khusus Indonesia. Terkait isu di kawasan Amerika dan Eropa, Indonesia berperan aktif dalam pembahasan sejumlah isu di antaranya isu Kosovo, Krimea (Ukraina), Venezuela, Kolombia, dan Haiti. Pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara mitra seperti Belanda, Perancis, Rusia, Polandia, Inggris, Belgia, dan Jerman.

Untuk kawasan Timur Tengah, isu Palestina, Suriah, Yaman, Libya, dan Lebanon tetap jadi fokus Indonesia di DK, dengan mengadakan konsultasi bilateral dengan Kuwait dan Tunisia. Sementara itu, Isu Afghanistan, Iran, dan situasi di Jammu dan Kashmir menjadi perhatian utama Indonesia di kawasan Asia Selatan.

²² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). “Keanggotaan Indonesia pada DK PBB”. Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/hal_aman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb diakses pada 23 Februari 2020 pukul 19:55 WIB.

Sedangkan Asia Tenggara, situasi panas Rakhine State, Myanmar tetap menjadi fokus utama Indonesia. Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, tak lepas dari situasi di Semenanjung Korea. Dan untuk kawasan Afrika, mulai dari Sudan, Sudan Selatan, Mali dan Sahel, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, sampai Sahara Barat masih menjadi prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB.

3. Meningkatkan Upaya dalam Menanggulangi Terorisme dan Ekstrimisme

Isu terorisme dan ekstrimisme menjadi salah satu prioritas Indonesia di DK PBB selanjutnya. Indonesia senantiasa berkomitmen untuk upaya penanggulangan terorisme dan ekstrimisme. Dalam hal ini, mendapat kepercayaan untuk memimpin 3 Komite yang memiliki peran penting di DK PBB, diantaranya adalah menjadi Ketua Komite Sanksi 1267 yang menjatuhkan dan mengawasi pemberian sanksi terhadap mereka yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda, Ketua Komite Resolusi DK 1540 mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal oleh aktor non-negara, Ketua Komite Sanksi Resolusi DK 1988 mengenai Taliban serta Wakil Ketua Komite Sanksi DK mengenai Sudan Selatan

dan Komite Sanksi DK mengenai Irak.²³

4. Memastikan Adanya Sinergi antara Bina Damai dengan Pembangunan Berkelanjutan

Terkait kebijakan ini, fokus utama Indonesia adalah penguatan sinergi dalam rangka pemenuhan Agenda Pembangunan 2030 atau sering disebut *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 2030). Indonesia kemudian melakukan Kerja sama dengan Kolombia melaksanakan kegiatan *International Workshop on Crops for Peace*, berlangsung di Jakarta dan studi lapangan ke provinsi Riau.²⁴ Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari berbagai negara, di antaranya Kolombia, Afghanistan, Meksiko, Nigeria, Timor-Leste, Solomon Islands serta beberapa negara anggota ASEAN. Kegiatan bertujuan untuk membahas dan

²³ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Mei 21). "Indonesia Pimpin Upaya Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Penyebaran Senjata Pemusnah Massal di Dewan Keamanan PBB". Terdapat dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/274/berita/indonesia-pimpin-upaya-penanggulangan-terorisme-dan-pencegahan-penyebaran-senjata-pemusnah-massal-di-dewan-keamanan-pbb> diakses pada 15 Maret 2021 pukul 22:31 WIB.

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Hal 16.

mengembangkan konsep ekonomi berbasis pertanian yang berkontribusi pada proses perdamaian di kawasan-kawasan konflik.

5. Isu Palestina

Salah satu isu prioritas keanggotaan Indonesia di DK PBB sesuai dengan mandat Presiden RI adalah dukungan terhadap Palestina. Diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dilakukan melalui dialog yang mengedepankan *two-state-solution*. Dalam hal ini, Indonesia akan mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara anggota PBB dan organisasi internasional.

Bersama dengan negara-negara OKI, Indonesia juga berkomitmen untuk menemukan solusi damai penyelesaian masalah Palestina-Israel.²⁵ Tidak hanya bantuan politik, Indonesia juga mengirimkan bantuan untuk para pengungsi Palestina, pengembangan kapasitas bagi kaum perempuan di kamp-kamp pengungsi, pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza hingga pemberdayaan ekonomi.

Indonesia dipercaya menjadi *co-penholder* untuk isu Palestina bersama Kuwait dan Afrika Selatan yaitu dengan memprakarsai

penyusunan *Press Elements* DK PBB terkait penghancuran rumah warga Palestina di Sur Bahir.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DK PBB

Menurut Snyder, Bruck dan Sapin bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Untuk faktor internal sendiri terdiri atas:

1. Opini Publik

Opini publik menjadi bahan pertimbangan yang mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri. Dengan keanggotaan Indonesia di DK PBB, publik domestik berharap Indonesia dapat menyuarakan perlunya reformasi DK PBB agar selaras dengan tatanan global yang lebih inklusif. Hal ini kemudian yang mempengaruhi Indonesia dalam membuat kebijakan luar negerinya di DK PBB.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kebijakan luar negeri Indonesia di DK PBB terkait upaya perdamaian dunia melalui pendekatan dialog dan partisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, bahwa Indonesia telah berupaya untuk mendorong adanya reformasi di DK PBB itu sendiri. Dalam hal ini, Indonesia juga

²⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Maret 26). "Isu Palestina". Terdapat dalam https://kemlu.go.id/portal/id/read/23/halaman_list_lainnya/isu-palestina diakses pada 5 April 2021 pukul 13:52 WIB.

menyuarakan penghapusan hak veto, dimana Indonesia menegaskan perlunya dilakukan pembatasan terhadap penggunaan hak veto untuk tidak dipakai di kasus-kasus tertentu dimana secara jelas terjadi krisis kemanusiaan, sehingga adanya hak veto ini seringkali menghambat penyelesaian konflik-konflik internasional secara permanen.²⁶

2. Dukungan DPR

Terpilihnya Indonesia untuk yang keempat lainnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 juga mendapatkan dukungan dari DPR RI. Dalam hal ini, DPR kemudian menyambut baik atas kemenangan Indonesia tersebut. Dukungan DPR terhadap pencalonan Indonesia di DK PBB sangatlah penting, karena tanpa persetujuan dan dukungan dari DPR maka pemerintah Indonesia tidak dapat menjalankan usaha pencalonannya di DK PBB.

Dukungan parlemen juga mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia di DK PBB. Misalnya saja kebijakan terkait upaya dalam menanggulangi terorisme dan ekstrimisme. Dalam hal ini, parlemen kemudian

memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk mengangkat isu ini sebagai salah satu prioritasnya di DK PBB. Mengingat masih banyaknya aksi teror yang terjadi di dalam negeri, membuat DPR mengajak masyarakat untuk mewaspadaai gerakan teror dan radikalisme. Parlemen juga berpartisipasi dalam bentuk seruan dan juga pengadaan landasan hukum formal untuk pemberantasan terorisme.

3. Peran Media

Media menjadi salah satu faktor penting bagi pelaksanaan peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Dalam hal ini terdapat respon positif atas pemberitaan media dalam negeri terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Pemberitaan yang dipublikasikan tersebut berisi tentang pengumuman pencalonan Indonesia, pemberitaan mengenai dukungan dari negara lain terhadap pencalonan Indonesia hingga analisis tentang peluang Indonesia memperoleh kursi di DK PBB. Ada banyak media nasional yang kemudian mendukung pemberitaan Indonesia di DK tersebut diantaranya adalah Antara News, Kompas, Tempo, Detik.Com, *The Jakarta Post* hingga media asing seperti CNN dan BBC. Media-media tersebut melakukan pemberitaan mulai dari pencalonan Indonesia di DK PBB, proses kampanye dan lobi,

²⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. (2017). *Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020*. Jakarta: Pusat P2K Multilateral Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Hal 92.

hingga alasan pentingnya Indonesia masuk menjadi bagian dari DK PBB.²⁷

Sementara itu faktor eksternal menurut Snyder yaitu kondisi yang ada di luar wilayah negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari negara lain, serta adanya campur tangan dari organisasi internasional dan regional. Misalnya saja, kebijakan terkait Isu Palestina, dimana dalam merumuskan kebijakan ini, terdapat pula campur tangan dari negara-negara muslim lainnya yang tergabung dalam organisasi OKI yang menaruh harapan besar terhadap keanggotaan Indonesia di DK PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurut Snyder, ada empat faktor penting dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri yaitu: motivasi, arus informasi, pengaruh politik internasional, keadaan atau situasi saat keputusan diambil.

1. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya perdamaian dunia melalui pendekatan dialog dan partisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB. Motivasi utama Indonesia mengambil kebijakan tersebut karena didasari dari masih banyaknya wilayah atau kawasan di dunia yang mengalami konflik.

²⁷ Ibid. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Hal 138-139.

Indonesia kemudian ingin mewujudkan perdamaian dunia melalui budaya *habit of dialogue* yaitu penyelesaian konflik secara damai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke daerah-daerah yang terlibat konflik. Kebijakan ini telah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia yang termuat dalam visi misi Presiden Jokowi yaitu dengan berperan aktif dalam penyelesaian konflik (*conflict resolution*), penjagaan perdamaian (*peace-keeping*) dan bina perdamaian (*peace-building*).²⁸ Untuk keadaan atau situasi, bisa dikatakan situasi saat kebijakan ini diambil sedang dalam krisis, mengingat masih banyaknya wilayah ataupun negara-negara yang mengalami konflik serta adanya krisis kemanusiaan dimana mereka membutuhkan bantuan dunia internasional untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

2. Kebijakan dalam meningkatkan sinergi antara DK PBB dengan organisasi kawasan dalam mengatasi konflik di kawasan. Dorongan utama Indonesia mengambil kebijakan tersebut adalah karena masih banyaknya terjadi konflik di beberapa kawasan dimana

²⁸ Maghfura, Rahmiatin Tahdinata. "Upaya Indonesia Untuk Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019-2020". *JOM FISIP*. Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019. Hal 8.

membutuhkan peran antara organisasi regional dan organisasi internasional seperti PBB untuk mengatasi persoalan keamanan kawasan yang berpotensi memunculkan terjadinya konflik. Diperlukan organisasi yang kuat, yang memiliki kapasitas untuk menangani masalah kawasan dengan baik. Sinergi sangat bermanfaat agar satu masalah di kawasan tidak dibiarkan begitu saja dan mengganggu stabilitas serta perdamaian kawasan dan dunia. Terdapat pengaruh lingkungan internasional terhadap kebijakan ini. Misalnya saja keamanan di perairan Laut China Selatan yang dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. Karena konflik kawasan ini berkaitan juga dengan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memang harus segera mengambil kebijakan ini sebagai prioritasnya di DK PBB.

3. Kebijakan dalam meningkatkan upaya penanggulangan terorisme dan ekstrimisme. Isu ini tidak hanya menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat internasional, tetapi juga merupakan masalah serius yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadikan dorongan utama bagi Indonesia untuk mengangkat isu terorisme di DK PBB. Melalui keanggotaannya

di DK PBB, Indonesia menegaskan kerja sama internasional untuk memerangi terorisme harus diperkuat, termasuk memerangi akar masalahnya. Tentunya pengaruh politik luar negeri sangat mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan tersebut dikarenakan banyak negara juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia karena masih menjadi target atau sasaran utama dari aksi teror tersebut. Pada dasarnya, Indonesia memang harus mengambil kebijakan tersebut karena isu ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi dunia internasional juga sedang dalam situasi krisis dalam memerangi terorisme.

4. Kebijakan terkait penciptaan perdamaian yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Motivasi utama Indonesia adalah ingin menciptakan perdamaian melalui aspek pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perlindungan HAM, serta pemajuan proses politik yang inklusif serta demokrasi. Tentunya, terdapat pengaruh dari politik internasional terhadap kebijakan ini, mengingat pemenuhan SDGs ini sangat penting artinya bagi hajat hidup bangsa di seluruh dunia sehingga perlu adanya penguatan kerja sama internasional. Jika target SDGs tidak tercapai, maka perdamaian dan stabilitas dunia dapat terganggu. Situasi atau keadaan saat keputusan ini diambil

memang tidak sedang dalam krisis karena agenda ini fokusnya akan dilaksanakan pada 2030, tetapi upaya untuk pemenuhan agenda tersebut harus dilakukan dari sekarang.

5. Kebijakan Indonesia terkait isu Palestina. Adapun motivasi yang mempengaruhi Indonesia untuk mengambil kebijakan tersebut adalah Indonesia merasa berhak untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Walaupun bukan negara muslim seutuhnya, Indonesia tetap ingin memprioritaskan isu Palestina dengan berusaha untuk meyakinkan negara-negara besar di DK PBB untuk mendorong proses perdamaian di negara tersebut. Ditambah lagi dari adanya pengaruh politik internasional dimana negara-negara muslim lainnya yang tergabung dalam organisasi OKI menaruh harapan besar kepada keanggotaan Indonesia di DK PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia memang harus mengangkat masalah konflik yang terjadi di Palestina sebagai salah satu sasaran politik luar negerinya di DK PBB, mengingat sampai saat ini Palestina masih mengalami krisis kemanusiaan sehingga negara ini membutuhkan bantuan dari dunia internasional untuk dapat

menyelesaikan konflik antara Palestina-Israel.

KESIMPULAN

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia telah banyak melakukan pencapaian yang tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, tetapi menjadi jembatan untuk menyalurkan kepentingan masyarakat internasional. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri tersebut. Kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat tentunya selaras dengan kepentingan nasional dan arah politik luar negeri Indonesia itu sendiri sesuai UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Data Resmi

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Keanggotaan Indonesia pada DK PBB". Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). "Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)". Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-pbb

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Lensa Satu Tahun Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Buku

Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mas'ood, Mohtar. (1990) . *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Morgenthau, Hans J. (1948). *Politics Among Nations The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knof.

Yani, Mochamad Yanyan, Anak Agung Banyu Perwita. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Jurnal

Asrudin, Azwar. "Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional : Realisme sebagai Paradigma". *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*. IJIS Vol.1 No.2 Desember 2014.

Hudson, Valerie M. "Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations". *International Studies Association*. 2005.

Krustiyati, Atik. "Konsekuensi Indonesia sebagai Anggota

Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Majelis*. Edisi 02, Februari 2019.

Omba, Marthinus. "Tanggung Jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan Internasional". *Indonesian Journal of International Law*. Volume 5 No 4 Juli 2008.

Sumber Internet

Voice of America. (2019, Januari 3). "Indonesia Resmi Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html>

Kompas. (2016, September 1). "Indonesia Siap Kampanye Pencalonan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/01/23125801/indonesia.siap.kampanye.pencalonan.anggota.tidak.tetap.dewan.keamanan.pbb>

Kompas. (2020, Februari 10). "Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?". Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/120000069/mengapa-indonesia-keluar-dari-pbb-pada-1965?page=all>